

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek perekonomian menjadi aspek yang amat krusial serta terus menjadi perhatian oleh pemerintah. Kebijakan demi kebijakan terus dilakukan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan yang selalu menjadi perhatian di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi ialah tolok ukur penting sebuah negara pada kemakmuran rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengapa suatu negara dapat tumbuh pada tingkatan yang tidak sama dari waktu ke waktu, contohnya saja terdapat negara maju dan negara berkembang. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan atau *output* nasional melalui kebijakan-kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam memanfaatkan variabel ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter (Etim et al., 2021).

Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang jika ingin keluar dari negara berpendapatan menengah hingga negara berpendapatan tinggi. Pemerintah telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang yang tertera pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang memuat Visi Indonesia Emas 2045, yaitu cita-cita Indonesia sebagai negara maju yang mempunyai pendapatan per kapita sama dengan negara-negara berpendapatan tinggi dan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia (Metrotv, 2024). Untuk

mewujudkan visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2023) menjabarkan bahwa Indonesia memerlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun pada skema transformatif agar keluar dari *middle income trap* atau jebakan pendapatan menengah di tahun 2041, atau 7% per tahun pada skema yang lebih optimis agar keluar pada tahun 2038.

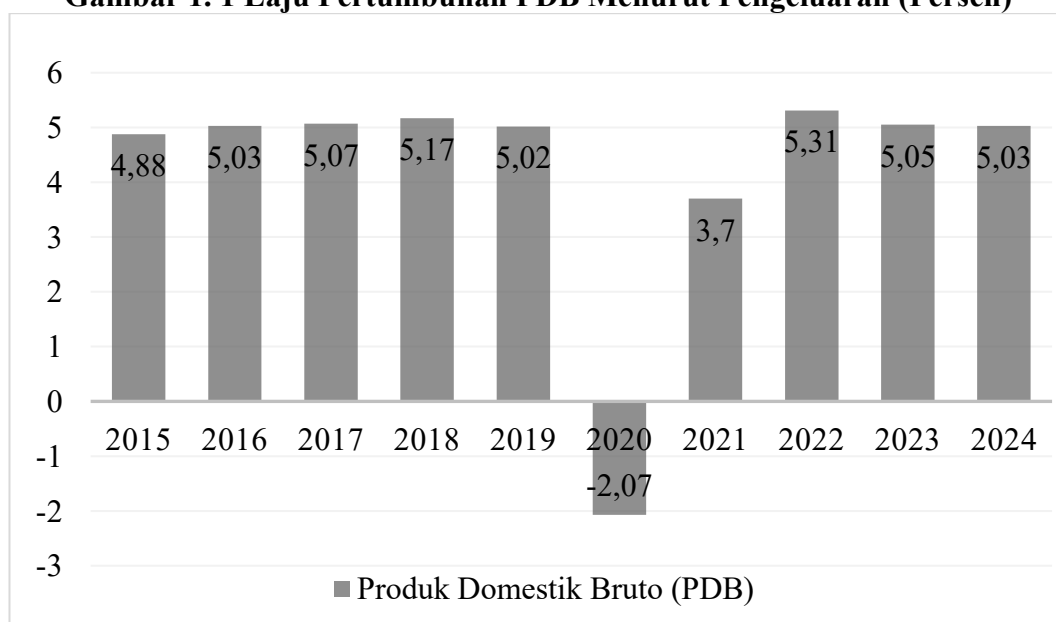
Apabila laju pertumbuhan tersebut tidak tercapai, ancaman *middle income trap* akan terus membayangi perekonomian Indonesia. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Gill I. & Kharas H. (2007) dalam laporan *World Bank* berjudul *An East Asian Renaissance*, yang menggambarkan keadaan suatu negara berhenti berkembang setelah mencapai tingkat pendapatan menengah dan tidak pernah tercapai status negara berpendapatan tinggi. Keadaan ideal yang diharapkan RPJPN 2025-2045 inilah yang seharusnya menjadi acuan dalam mengukur kemampuan pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya. Target RPJPN 2025-2045 bersifat normatif sebagai tolok ukur yang berlaku mundur terhadap data sebelum tahun 2025, menimbang rendahnya laju pertumbuhan pada sepuluh tahun sebelumnya justru menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menetapkan target tersebut.

Namun demikian, keadaan ideal tersebut masih jauh bertentangan dengan capaian sebenarnya. Dikutip dalam Metrotv (2024) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan pada kisaran 5% selama dua puluh tahun terakhir, sebuah keadaan yang memperbesar kemungkinan Indonesia terjebak lebih lama sebagai negara berpendapatan menengah. Pernyataan tersebut searah dengan perhitungan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015-2024

berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yaitu sebesar 4,22% per tahun apabila penyusutan tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 turut diperhitungkan, atau 4,92% per tahun apabila tahun 2020 dikeluarkan sebagai keadaan penyimpangan, yang keduanya berada pada kisaran 5%. Dengan target minimal 6 sampai 7 persen per tahun secara tetap, maka terdapat kesenjangan sekitar 1 hingga 2 poin persentase yang harus dikejar pemerintah, sebuah jarak yang tidak kecil apabila dilihat dari kecenderungan pertumbuhan sepuluh tahun terakhir.

Gambaran mengenai kesenjangan tersebut dapat dilihat menggunakan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia berikut.

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah menyentuh 6% yang menjadi syarat keluar dari *middle income trap*. Capaian tertinggi hanya terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,31%, yang masih di bawah target minimal. Perekonomian bahkan pernah hingga minus 2,07% pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh wabah Covid-19, sebelum berangsur membaik sebesar 3,70%

pada tahun 2021 dan kembali ke kisaran 5% pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 5,31% pada tahun 2022, 5,05% pada tahun 2023, dan 5,03% di tahun 2024.

Target pertumbuhan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045 belum tercapai hingga saat ini. Kesenjangan yang berulang setiap tahun ini bukan sekadar catatan statistik, melainkan suatu gambaran adanya permasalahan struktural yang perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dari sisi kebijakan fiskal yang berperan sebagai bagian dari alat utama pemerintah guna memajukan perekonomian. Permasalahan struktural ini penting untuk dipahami lebih dalam karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan fiskal pemerintah dalam membiayai kegiatan yang mendukung perekonomian. Ketika penerimaan negara tidak mampu mengimbangi kebutuhan pembiayaan pembangunan, ruang gerak pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif menjadi terbatas. Keadaan ini semakin relevan dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan kerugian anggaran yang harus ditutupi melalui pembiayaan, sehingga optimalisasi sisi penerimaan menjadi penting agar ketergantungan pada pembiayaan kerugian dapat dikurangi.

Berbagai faktor telah diidentifikasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik dari segi produksi maupun pengeluaran. Dari segi pengeluaran faktor seperti konsumsi rumah tangga, pendanaan atau Pembentukan Modal Tetap Bruto, ekspor neto, serta belanja pemerintah termasuk berkontribusi bagi capaian pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 54,04% bagi pertumbuhan ekonomi 2024, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto naik 4,61% dengan ekspor barang dan jasa juga naik 6,51% pada periode yang sama (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain faktor-faktor tersebut, kebijakan

fiskal pemerintah dengan salah satu sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak turut memastikan seberapa besar bagian pemerintah akan membiayai belanja produktif yang mendorong perekonomian.

Penerimaan pajak di Indonesia sendiri tercatat sebagai nilai paling tinggi dalam Realisasi Pendapatan Negara yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik. Hal tersebut menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak beserta hibah. Maka dari itu, pemerintah harus terus memperhatikan aspek penerimaan pajak ini karena dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara yang menjanjikan. Data penerimaan pajak disajikan dalam tabel Realisasi Pendapatan Negara berikut.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.628.950	2.006.334	2.630.147	2.766.746	2.801.862
1. Penerimaan Perpajakan	1.285.136	1.547.841	2.034.552	2.154.208	2.309.859
a. Pajak Dalam Negeri	1.248.415	1.474.145	1.943.654	2.089.718	2.234.959
(1) Pajak Penghasilan	594.033	696.676	998.213	1.061.234	1.139.783
(2) PPN dan PPnBM	450.328	551.900	687.609	763.633	811.365
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	20.953	18.924	23.264	33.271	27.182
(4) BPHTB	-	-	-	-	-
(5) Cukai	176.309	195.517	226.880	221.851	246.079
(6) Pajak Lainnya	6.790	11.126	7.686	9.730	10.549
b. Pajak Perdagangan Internasional	36.721	73.695	90.897	64.490	74.900
(1) Bea Masuk	32.443	39.122	51.077	50.892	57.372
(2) Pajak Ekspor	4.277	34.572	39.819	13.598	17.528
2. Penerimaan Bukan Pajak	343.814	458.493	595.594	612.537	492.003
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	97.225	149.489	268.770	254.203	207.669
b. Pendapatan dari KND	66.080	30.496	40.597	82.059	85.845
c. PNBP	111.200	152.504	196.324	180.415	115.136

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
d. Pendapatan BLU	69.308	126.002	89.902	95.860	83.352
II. Hibah	18.832	5.013	5.696	17.184	430
Jumlah	1.647.783	2.011.347	2.635.843	2.783.930	2.802.293

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Penerimaan pajak yang menjadi penerimaan paling tinggi di Indonesia tidak menjamin bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan oleh perbandingan antara penerimaan perpajakan dan juga PDB menjadi indikator pertumbuhan ekonomi bergerak naik dan turun atau tidak pernah stabil dari tahun ke tahun sehingga memunculkan pertanyaan apakah sumber penerimaan terbesar Indonesia saat ini benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berikut merupakan data Proporsi antara Realisasi Pendapatan Negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 1. 2 Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap PDB

Sumber Pendapatan	Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara/PDB	13,1	12,38	10,67	11,85	13,46	12,91	12,82
Perpajakan/PDB	10,24	9,77	8,32	9,12	10,39	9,99	10,08
Penerimaan bukan pajak/PDB	2,76	2,58	2,23	2,7	3,04	2,92	2,61
Hibah/PDB	0,1	0,03	0,12	0,03	0,03	0,07	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Penelitian serupa telah dilakukan guna melaksanakan pengujian akan apakah penerimaan pajak dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adefolake & Omodero (2022) meneliti di Nigeria menemukan bahwa pajak penghasilan minyak bumi, pajak pertambahan nilai, beserta pajak penghasilan perusahaan berdampak signifikan positif bagi pertumbuhan ekonomi. Nwuzor (2024) meneliti periode 1990 sampai 2020 di negara yang sama dan menemukan

hasil sama yaitu pajak penghasilan minyak bumi, pajak penghasilan perusahaan, dan pajak pertambahan nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Augustine & Ebiafue (2026) menambahkan bukti dengan temuan yang sama yaitu pajak penghasilan minyak bumi, pajak penghasilan perusahaan, dan pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian-penelitian tersebut belum sama dan sebagian besar dilakukan di Nigeria yang memiliki struktur perpajakan dan komposisi penerimaan negara yang berbeda dari Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan dari minyak bumi yang tidak menggambarkan struktur penerimaan pajak Indonesia. Kesenjangan geografis dan struktural ini yang mendasari perlunya pengujian tersendiri untuk Indonesia dengan variabel yang relevan dengan struktur penerimaan Indonesia.

Berdasarkan pada data dari BPS, pajak penghasilan menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan. Disusul dengan penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta penerimaan dari cukai. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 1987 sampai 2024 dengan tiga variabel penerimaan pajak yang digunakan adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta Cukai, sementara pertumbuhan ekonomi dilaksanakan pengukuran melalui PDB.

Pemilihan tahun 1987 sebagai periode awal penelitian didasarkan pada pertimbangan konsistensi struktur perpajakan. Reformasi perpajakan nasional yang berlangsung pada 1983 hingga 1985, mencakup pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 1983 serta Undang-Undang Nomor 12 dan 13 Tahun 1985, mengubah sistem pemungutan pajak Indonesia dari *official assessment* menjadi *self assessment* dan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengganti Pajak Penjualan efektif 1 April 1985 (Bawazier, 2011). Dengan mengawali periode penelitian pada tahun 1987, yaitu sekitar dua tahun setelah reformasi tersebut, seluruh data yang dianalisis berada dalam satu sistem perpajakan yang konsisten sepanjang 1987 hingga 2024, sehingga terhindar dari percampuran data antara sistem perpajakan lama dan baru yang dapat mengganggu data *time series*.

Pemilihan PPh, PPN dan PPnBM, serta cukai sebagai variabel penelitian didasarkan pada pertimbangan materialistis, yaitu ketiganya merupakan jenis pajak dengan kontribusi penerimaan terbesar bagi negara, sehingga pengaruh terhadap perekonomian Indonesia paling relevan untuk diteliti, baik secara akademis maupun kebijakan. Sebaliknya, jenis penerimaan pajak dengan kontribusi terkecil seperti Pajak Bumi dan Bangunan sektor pusat dan Pajak Lainnya tidak dipilih karena kontribusi terhadap total penerimaan negara relatif kecil dan stabil dari tahun ke tahun, sehingga secara ekonomi kurang material untuk diharapkan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara kebijakan bukan merupakan instrumen fiskal utama yang menjadi optimalisasi pemerintah.

Dengan demikian, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Cukai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dari 1987 sampai 2024”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang, berikut rumusan permasalahan pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan cukai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah dijabarkan, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh dari penerimaan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1987 hingga tahun 2024.
2. Mengetahui pengaruh dari penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1987 hingga tahun 2024.
3. Mengetahui pengaruh dari penerimaan cukai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1987 hingga tahun 2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dari teoritis serta praktis berupa:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini bisa berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam perpajakan serta berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa berguna untuk pemerintah guna merumuskan kebijakan perpajakan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk kesejahteraan warga negara di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa memberi edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya kontribusi pajak yang dibayarkan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini bisa berperan sebagai rujukan untuk peneliti berikutnya terkait pengaruh perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang meliputi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan menjabarkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan studi, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka berisikan landasan teori penjabaran terkait konsep beserta prinsip mendasar yang dibutuhkan guna menuntaskan permasalahan, serta pembahasan perolehan dari sejumlah penelitian sebelumnya. Bab ini berhubungan dengan permasalahan guna dimanfaatkan menjadi kerangka konseptual beserta dasar pembuatan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilakukan dan cara yang dimanfaatkan guna menganalisis topik penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan mendeskripsikan mengenai gambaran umum, statistika deskriptif, hasil analisis data, interpretasi hasil beserta tanggapan akan perolehan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran, serta implikasi temuan penelitian.